



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : ASISTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TOTOK BUDI MULYANTO**
2. Jabatan : **ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **219428**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 611.000.000**

1. Tanah Seluas 193 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. Tanah Seluas 160 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/350 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah Seluas 366 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 320.500.000**

1. MOBIL, VW BEETLE MINIBUS Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA-X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



6. MOBIL, HONDA CR-V SUV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	86.444.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.014.309.519
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.032.253.519
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.032.253.519

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.